

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hollis dan Smith mengatakan bahwa hubungan internasional memiliki dua buah arti yang berbeda. Pertama ialah hubungan internasional sebagai sebuah fenomena, serangkaian kejadian di dunia internasional. Kedua adalah sebagai sebuah *academic field*, disiplin ilmu (Hollis & Smith, 1990). Fenomena globalisasi mempengaruhi hubungan internasional di dalam kedua definisi di atas. Globalisasi tidak hanya mempertanyakan konsep-konsep tertentu dalam hubungan internasional dengan memunculkan fenomena-fenomena baru. Namun globalisasi juga mempertanyakan logika dasar dalam teori hubungan internasional itu sendiri, yang memberi tantangan pada hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu.

Sebagai sebuah fenomena, ada berbagai macam pandangan mengenai pengaruh globalisasi terhadap hubungan internasional. Menurut Held, ada empat konsep yang dapat menggambarkan pengaruh globalisasi terhadap dunia sosial pada umumnya. Pertama ialah *social stretch*, artinya proses kultural, ekonomi, dan politik masyarakat melebar mencakup lebih dari perbatasan yang dibentuk oleh negara bangsa, hingga kejadian dan keputusan di sebuah tempat dapat mempengaruhi secara signifikan sesuatu yang jauh dari asal kejadian dan keputusan tersebut. Kedua ialah *intensify*, yaitu meningkatnya kepadatan interaksi di seluruh dunia yang dapat berarti dampaknya akan terasa lebih kuat. Ketiga adalah *interpenetration* globalisasi menciptakan perbedaan di tingkat yang paling kecil, penyebabnya ialah seakan-akan masyarakat yang berbeda dapat menjumpai satu sama lainnya di tingkatan paling lokal. Keempat adalah pengaturan *infrastructure* dan *institution* demi harmonisasi yang semakin banyak secara kuantitas dan semakin luas dalam kualitas (Held & McGrew, 2000).

Persamaan dalam keempat konsepsi tersebut ialah keempatnya memberikan tantangan bagi bentuk negara kedaulatan yang berdasarkan *teritory* sebagai aktor utama dalam fenomena hubungan internasional. Menurut Robert Jackson

globalisasi menjadi isu yang penting ketika *the good life* di dalam lingkungan domestik semakin dipengaruhi oleh sebab-sebab dari eksternal negara Artinya walaupun dulu telah ada fenomena-fenomena yang memiliki pengaruh menembus batas kedaulatan, masalah globalisasi kian terasa dengan semakin meningkatnya efek dari pengaruh-pengaruh tersebut hingga mengganggu lingkungan domestik yang sebelumnya sepenuhnya terkontrol oleh pemerintahan nasional (Clark, 1999). Karena itu di berbagai lingkup kajian mengenai hubungan internasional muncul berbagai ide dan tulisan mengenai globalisasi yang kebanyakan berhubungan dengan terkikisnya bentuk negara kedaulatan yang semakin lama semakin rentan. Konsep-konsep yang dipertanyakan diantaranya adalah ekonomi nasional (dalam IPE), *state* sebagai penyedia keamanan nasional (dalam kajian keamanan), daya tahan institusi demokrasi yang berdasarkan *teritorial state* (dalam teori politik), dan lain sebagainya. Isu globalisasi mencakup semua masalah ini, jika tidak dianggap merupakan penyebabnya. Namun pengaruh globalisasi tidak hanya sebatas itu, ia juga mempengaruhi hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu, dengan mempertanyakan hal paling dasar yang membentuk disiplin tersebut.

Menurut Ian Clark asumsi tradisional yang mendasari perkembangan teoritis ilmu hubungan internasional ialah adanya sebuah *great divide* antara lingkungan domestik dan internasional. Dasar dari perbedaan yang ada di dalam *the great divide* adalah diferensiasi empiris dari dua lingkungan yang berbeda. Dalam masyarakat domestik, di dalam negara, terdapat tata aturan yang mengatur subyek-subyek di dalamnya hingga pencapaian tujuan dan pemeliharaan nilai yang universal dapat dilakukan. Sementara di tingkat internasional adalah lingkungan yang anarki yang aktor-aktor di dalamnya harus bergantung pada usaha masing-masing serta pergulatan kekuatan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul. Konsep ini memegang peranan yang penting dalam berdirinya ilmu hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu. Jika lingkungan internasional berbeda dengan lingkungan domestik maka berakibat kebutuhan dua kerangka berpikir yang berbeda untuk mempelajari masing-masing, artinya adalah alat analisis masing-masing. Dengan beroperasi melalui

pembagian pekerjaan ini, ilmu politik dan perbandingan politik melakukan studi internal *state* secara sedangkan hubungan internasional merupakan studi secara hubungan eksternal *state*. Hal ini didorong dengan konkrit melalui pandangan hubungan internasional rasionalis (neorealis-neoliberal) yang menggambarkan wilayah internasional memiliki strukturnya sendiri. Baik neorealis ataupun neoliberal melihat *state* terkekang oleh kondisi di tingkat internasional, perbedaannya ialah yang pertama menekankan anarki yang kedua menekankan kesalingketergantungan. Dengan adanya asumsi ini, demi tujuan kenyamanan analisis, politik domestik dan politik internasional dianggap sebagai dua hal yang terpisah dengan berkonsentrasi pada *state* sebagai unit analisis (Smith, 2004). Hasilnya ialah kecenderungan ilmuwan hubungan internasional untuk menjadi seorang *international anarchists* (Shaw, 2000). Mereka percaya bahwa dunia adalah dan harus tetap terpisahkan sebagai komunitas-komunitas politik yang berdaulat. Apapun perspektif mereka selalu ada kecenderungan menuju *anarchophilia*, bahwa tatanan dunia hanya dapat terbentuk dalam dasar ini (Buzan & Little, 2000).

Pengaruh konsepsi mengenai *great divide* di atas menimbulkan kecenderungan untuk melihat *state systems* dan *globalization* sebagai dua hal yang terpisah bahkan menempatkan salah satunya di depan yang lain. Globalisasi adalah sebuah lingkungan yang memaksa *state* untuk menyesuaikan dirinya. Padahal pada kenyataan perkembangan bentuk *state* dan globalisasi berjalan bersamaan dan terus menerus saling mempengaruhi secara mutual (Cerny, 1995; Ruggie, 1998; Scholte, 1997). Meminjam pendapat Giddens, seperti kedaulatan, yang terbentuk oleh sisi domestik dan sisi internasional yang selalu memberikan redefinisi terhadapnya. Globalisasi juga bukan hanya merupakan sebuah lingkungan di mana *states* ada, namun adalah elemen dari bentuk dan fungsi *states* tersebut (Giddens, 1998). Atas dasar itu dibutuhkan kerangka berpikir untuk meninggalkan asumsi *the great divide* di atas, yang mampu menjelaskan *state* sebagai penghubung, bukan pemisah antara domestik dan internasional. Sebuah pemikiran yang secara holistik dapat menempatkan globalisasi sebagai pendorong rekonstruksi bentuk *state* dalam kepuangan kekuatan-kekuatan sosial disekitarnya

(Clark, 1999). Karena *state system* dan globalisasi tidak memiliki hubungan yang konfliktual, contohnya gerakan kapital global bahkan cenderung komplementer dengan perkembangan *system of states* (Scholte, 1997).

Usaha untuk terlepas dari dikotomi internasional/domestik ini sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa pemikir dalam ilmu hubungan internasional (Clark, 1999). Keohane dan Milner misalnya mengemukakan pemikiran mengenai '*second image revisited*', yaitu bagaimana kebijakan ekonomi politik sebuah negara yang kemudian menjadi aspek dari politik domestik. Maksudnya ketika negara melakukan kebijakan internasional untuk mempengaruhi ekonomi nasional negara tersebut, secara otomatis kebijakan ekonomi politik internasional dari negara menjadi bagian dari dinamika politik di dalam negeri.

Usaha ini juga dapat ditemukan dalam tulisan Moravscik yang mengemukakan bahwa strategi dan taktik diplomasi tekekang oleh dua hal, yaitu apakah negara lain akan menerimanya dan apakah konstituensi di dalam negara akan menyetujuinya. Dengan kata lain untuk memutuskan kebijakan internasional negara harus mempertimbangkan pendapat negara lain dan pendapat rakyatnya, atau paling tidak kelompok kepentingan di dalam negeri. Karena setiap bentuk kerjasama dan kebijakan internasional membutuhkan reatifikasi parlemen.

Pemikiran-pemikiran di atas terlihat telah memasukan kedua sisi di dalam analisisnya. Pengaruh internasional diperhitungkan dengan perhatian yang sama dengan pengaruh domestik. Namun tetap saja perbedaan antara dinamika domestik dan internasional masih sangat jelas. Keduanya melihat domestik dan internasional sebagai sesuatu yang *given*, artinya keduanya ada di luar proses pengambilan keputusan, *exogeneous* dari aktor pengambil keputusan, dalam hal ini *state*. Ciri khas lain ialah hubungan antar keduanya, domestik dan internasional, dipandang sebagai sebuah konflik, *state* atau pengambil keputusan di dalam *state*, harus bergerak sepanjang garis kepentingan domestik dan internasional. *State* melakukan tarik ulur antara kepentingan di dalam negeri dan kepentingan aktor lain di sistem internasional. Jadi proses pengambilan keputusan adalah strategi untuk mencari irisan antara dua sisi yang berbeda, domestik dan internasional. Atas dasar itu, walaupun telah berusaha memasukan kedua sisi, kelompok ini

masih memisahkan antara keduanya, tidak meninggalkan dikotomi domestik/internasional.

Usaha kedua adalah yang dilakukan oleh cara pandang *historical materialism* dan *world system theory*. Kelompok ini melangkah lebih jauh lagi dengan membuang seluruhnya konsep perbedaan antara domestik dan politik. Caranya dengan mereduksi ruang internal dan eksternal, hanya sebagai bagian-bagian fungsional dari sebuah sistem yang terintegrasi di seluruh dunia. Karena itu negara tidak lebih dari epifenomena yang hadir akibat sistem dunia yang terintegrasi, negara hanyalah obyek dari perubahan-perubahan di tingkat sistemik. Karena itu pandangan ini juga dikenal dengan paradigma strukturalis.

Historical materialism menganggap bahwa tidak ada sistem internasional seperti yang digambarkan oleh ilmu hubungan internasional, yaitu sistem negara-negara. Oleh karena itu, hubungan internasional menjadi kajian hubungan antara formasi sosial yang ada di sistem dunia, bukan lagi kajian antara negara-negara. Pandangan ini berfokus pada kritik atas analisis yang tidak historis, mengacuhkan sejarah, dan hanya melihat sebuah permasalahan seakan-akan berada di sebuah *tabula rasa*. Kritik terutama pada cara pandang mikroekonomi dari kelompok neorealis/neoliberal, mereka menyerukan untuk dimasukkannya kembali pengaruh sejarah di dalam fenomena-fenomena masa kini.

Sedangkan *World system theory* melihat ekonomi dunia terfragmentasi menjadi unit-unit politik yang independen, yang letaknya berada di ekonomi yang terintegrasi, yang dapat dijelaskan melalui satu hal, pembagian kerja (*division of labour*). Wallerstein melihat bahwa dunia masa kini merupakan sebuah sistem ekonomi kapitalis yang besar, sebuah kompleks industri komersil dalam skala terbesar. Fokus perhatian dari hubungan internasional adalah ekonomi, karena ekonomilah yang menggerakkan dunia. Sistem ekonomi tersebut membagi dunia menjadi negara-negara inti dan negara pinggiran yang pembagiannya berdasarkan aktivitas ekonomi, atau lebih tepatnya antara pemilik modal dan pekerja.

Dapat diperhatikan bahwa keduanya secara total membuang dikotomi adanya sistem domestik dan internasional. Fenomena hubungan internasional ada berada dalam sistem yang tunggal, yang efeknya tidak memperhitungkan *state* sebagai

faktor utama. Mereka mengedepankan struktur sebagai faktor utama katalisator fenomena hubungan internasional yang mengatur hubungan antar aktor serta membatasi kemungkinan-kemungkinan tingkah laku di masyarakat. Masalahnya adalah sesungguhnya cara pandang demikian memiliki persamaan yang signifikan dengan dua kelompok lainnya yang mereka kritik sebagai ahistoris. Persamaannya ialah menghilangkan peran agen seutuhnya dalam kenyataan sosial, mereka mengacuhkan kemungkinan perubahan di dalam masyarakat.

Pandangan ketiga adalah pandangan mengenai *international society* sebagai tujuan dari ilmu hubungan internasional. Pandangan ini dapat disamakan dengan *english school of international relation* yang berkembang di Eropa. Dasarnya adalah bahwa *state* mempunyai hak dan kewajiban, yang merupakan kenyataan konkrit, yang ada di dalam pikiran individu yang bertindak atas nama *state*. Walaupun *state* tidak akan pernah mempunyai tujuan dan nilai yang sama, mereka sama di dalam kode tentang ke saling keberadaan, *coexistence*. Ini berkaitan dengan tujuan awal dari terciptanya ilmu hubungan internasional, yang merupakan usaha mencapai kedamaian dunia. Karena itu dipecah-pecahnya internasional dalam bentuk *state* dan politik internasional adalah sebuah kesalahan. Fokus teori hubungan internasional adalah mengembangkan dan mendorong terciptanya masyarakat internasional atau lebih jauh lagi masyarakat dunia (*world society*).

Pemikiran ini dengan jelas menghubungkan individu, *state*, dan *international society* di dalam sebuah *field* yang sama. Walaupun kelihatannya dunia manusia dan dunia negara bangsa terpisah, mereka terhubung melalui tujuan serupa yang mereka kejar. Negara harus berdasarkan nilai-nilai yang sama karena tiap individu mempunyai hak yang sama. Masalah dari pandangan ini ialah mereka tidak dapat memberikan alasan mengapa *state* akan memilih mematuhi aturan bersama dibandingkan dengan memenuhi *self interest* nya. Menurut Marsehaeimer, kelompok *international society* tidak dapat menjelaskan penyebab mengapa *state* akan selalu menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional di atas identitas dan kepentingannya.

Kelompok keempat adalah pandangan yang dikenal dengan nama konstruktivis.

Secara garis besar konstruktivis adalah pandangan yang berusaha melihat kepentingan dan identitas *state* sebagai sesuatu yang tidak *fixed* ataupun *given*, melainkan sesuatu yang mencerminkan perubahan historis. Di saat yang sama juga kemudian membangun struktur, yang nantinya turut menentukan identitas dan kepentingan *state* juga. Negara dan sistem di luarnya *mutally constitutive* (saling membangun) dan berhubungan secara permanen melalui proses adaptasi terus menerus.

Namun kekurangan dari pandangan ini, menurut Mearsenheimer, adalah menutup mata dari dinamika perubahan sesungguhnya, cenderung melihat konstitusi mutual yang disebutkan di atas seakan-akan ideal harmonis. Padahal pada kenyataannya setiap perubahan tersebut membutuhkan *cost*, pengorbanan, dan derita. Kekurangan berikutnya ialah konsep *mutual constitution* bukanlah sesuatu yang simetris, seperti yang seakan-akan digambarkan oleh konstruktivis. Ada saatnya kekuatan eksternal lebih kuat dalam mengatur perilaku *state*, ada saatnya kekuatan domestik cukup kuat untuk tersalurkan melalui *state* hingga mengubah tatanan di tingkat internasional.

Berkaca dari kekurang-kekurangan teori-teori sebelumnya, penelitian ini mencoba memberikan alternatif teori lain untuk menggambarkan hubungan internasional di dalam kondisi globalisasi dalam bentuk paradigma sistem kompleks. Mengingat permasalahan terbesar dari globalisasi terhadap teori hubungan internasional ialah perannya dalam meningkatkan kompleksitas dunia internasional itu sendiri, paradigma kompleks akan lebih mampu beradaptasi daripada pendekatan sebelumnya.

Untuk lebih menjelaskan bagaimana paradigma sistem kompleks dapat memberikan alternatif baru bagi analisis globalisasi, karena sistem kompleks terbatas hanya sebuah *worldview* dan oleh karena itu tidak aplikatif, di dalam penelitian ini akan dikaji khusus mengenai teori sistem modern. **Teori Sistem Modern** dari Niklas Luhmann dapat mewakili pendekatan yang melihat dunia sebagai sistem yang kompleks, selain di dalam sosiologi (Luhmann terkenal sebagai sosiolog) tulisannya telah banyak digunakan di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lain seperti hukum, teologi, seni, filsafat, ekonomi hingga

neuroscience maupun ilmu komputer. Di dalam ilmu hubungan internasional sendiri pemikiran Luhmann diperkenalkan oleh Mathias Albert melalui tulisan-tulisannya di berbagai jurnal dan kemudian terangkum dalam buku *Observing International Relations: Niklas Luhmann and World Politics*.

1.2. Rumusan Permasalahan

Atas dasar latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka jelas bahwa untuk ilmu hubungan internasional dapat menjelaskan globalisasi secara lebih baik, masalah *the great divide* tersebut harus dapat diatasi terlebih dahulu. Permasalahan dikotomi domestik dan internasional dalam Hubungan Internasional semakin muncul ke permukaan bersamaan dengan munculnya isu globalisasi. Isu globalisasi tidak hanya memaksa Hubungan Internasional untuk memasukan isu-isu baru ke dalam kajiannya, namun turut mendorong kerangka dasar dari teori Hubungan Internasional untuk menyesuaikan diri dan mencari alternatif lain.

Kompleksitas diajukan sebagai alternatif kerangka berpikir yang lebih komperhensif, konstitutif, dan terbuka pada dinamisme untuk mengikuti pola perkembangan masyarakat dunia yang semakin global. Teori yang akan ditinjau penggunaannya dalam kerangka kompleksitas adalah teori sistem modern. Peninjauan dilakukan dengan melakukan simulasi teori tersebut ke dalam studi kasus salah satu fenomena globalisasi, yaitu pembentukan sistem finansial global. Pemilihan sistem finansial global didasari oleh posisi globalisasi ekonomi yang dampaknya sangat besar hingga menjadi pusat perhatian berbagai studi mengenai globalisasi. Sedangkan di dalam globalisasi ekonomi dunia tersebut, posisi globalisasi finansial sebagai satu-satunya fenomena yang mendekekati ketakberbatasan dalam kenyataan sebenarnya menjadikan ia sebagai fokus studi kasus yang paling tepat untuk menguji kemampuan teori yang diajukan dalam analisis mengenai globalisasi.

Paparan dari penelitian ini akan bersifat interpretatif melalui perumusan kerangka teori sistem modern untuk penggunaannya dalam hubungan internasional dan deskriptif dengan melakukan pemaparan kembali sejarah pembentukan sistem

finansial global dalam kerangka teori sistem modern. Karena itu pada dasarnya pertanyaan dari penelitian ini adalah:

“Bagaimana teori sistem modern menjelaskan pembentukan sistem finansial global?”

Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa teori yang berdasarkan pada cara pandang sistem kompleks, seperti Teori Sistem Modern dapat menyelesaikan permasalahan *great divide* di dalam teori Hubungan Internasional. Oleh karena itu akan mampu menjelaskan fenomena-fenomena hubungan internasional dalam dunia yang terglobalisasi secara lebih komperhensif.

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini ialah memberikan simulasi penerapan teori sistem modern pada penggambaran proses pembentukan sistem finansial internasional untuk menunjukkan sudut pandang paradigma kompleksitas sebagai alternatif dalam teori hubungan internasional. Namun untuk lebih jelasnya dapat dipecah menjadi tiga tujuan utama.

Tujuan pertama ialah menunjukkan paradigma kompleksitas sebagai alternatif pemecahan masalah *great divide* yang ada di dalam ilmu hubungan internasional. Latar belakang penelitian memperkenalkan masalah *great divide* dalam hubungan internasional, dan pentingnya untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini dalam perjalanannya akan menunjukkan bahwa paradigma kompleksitas mampu melakukan hal tersebut.

Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan permasalahan ialah melakukan simulasi penerapan teori sistem modern dalam kajian hubungan internasional melalui studi kasus pendeskripsian proses pembentukan sistem finansial internasional. Dari dijawabnya pertanyaan ini akan dapat menunjukkan perbedaan penggambaran proses berdasarkan teori sistem modern dan apa yang telah ada sebelumnya.

1.3.2. Signifikansi Penelitian

Sangat sedikit yang dapat dijelaskan oleh teori hubungan internasional mengenai globalisasi. Dalam bidang keuangan internasional, pada khususnya, masih banyak masalah-masalah yang belum dapat teratasi. Sementara dampaknya semakin terasa disebabkan oleh semakin besar, cepat, dan luasnya cakupan keuangan internasional di seluruh dunia. Segala upaya seperti mengendalikan volatilitasnya, melakukan regulasi yang cukup kuat untuk mencegah spekulasi dengan tindakannya yang sangat merugikan, hingga membentuk rejim peringatan pertama untuk krisis finansial menemui jalan buntu. Mungkin permasalahannya bukan karena kesalahan pemecahan, namun lebih dalam lagi, yaitu kesalahan penggambaran. Hal ini juga ditemui pada masalah-masalah globalisasi lainnya seperti media, migrasi, dan lain sebagainya.

Atas dasar itu cara pandang yang berbeda selalu dibutuhkan, untuk membandingkan entah itu sebab, deskripsi, solusi, dan lainnya. Karena itu alternatif pemikiran selalu akan baik untuk lebih memperkaya studi hubungan internasional yang bidangnya multidisiplin dan memiliki aktor yang sangat beragam. Atau lebih singkatnya, lebih banyak pilihan akan selalu lebih baik daripada kekolotan berpikir.

Maka signifikansi dari penelitian ini adalah memberikan alternatif pemikiran, bukan hanya dalam kajian keuangan internasional, bahkan tidak hanya dalam masalah globalisasi, namun untuk ilmu hubungan internasional secara keseluruhan. Perubahan dunia semakin lama semakin cepat dan semakin ekstrim, ilmu tidak dapat tetap.

1.4. Kerangka Pemikiran

Keputusan menggunakan Teori Sistem Modern sebagai teori yang digunakan untuk menguji kemampuan paradigma kompleksitas, sebagai cara pandang baru terhadap globalisasi, untuk memecahkan masalah *great divide* di dalam Hubungan Internasional memiliki sebuah kesulitan. Teori Sistem Modern bukanlah merupakan teori hubungan internasional, dalam arti pembangunan teorinya tidak ditujukan untuk menganalisis fenomena hubungan internasional. Untuk itu

dibutuhkan sebuah alat analisis untuk menghubungkan Teori Sistem Modern ke dalam ranah Hubungan Internasional.

Menurut Ian Clark (Clark, 1999) untuk keluar dari tradisi melakukan *great divide* dalam teori hubungan internasional dibutuhkan strategi integratif yang menolak dikotomi globalisasi sebagai eksternal dan transformasi *state* sebagai efek internal. Sumbangan yang dapat diberikan oleh teori globalisasi terhadap ilmu hubungan internasional adalah:

1. Fokus terhadap globalisasi dapat merespon tantangan yang diberikan pada teori hubungan internasional. Teori tersebut harus mampu melihat perkembangan sistem *states* dan kekuatan transnasional dalam perkembangan yang paralel, bukan saling menegasikan satu dan lainnya. Integrasi *state*, *state system* dan kekuatan transnasional merupakan kerangka yang globalisasi dapat berikan pada teori hubungan internasional.
2. Globalisasi harus dilihat lebih daripada hanya sebagai teori mengenai sistem kapitalis, namun juga tetap memandang kapitalisme secara serius. Kapitalisme harus dilihat melalui *states* dan di atas *states* dan bagaimana pentingnya ia terhadap perubahan di dalam *states*. Globalisasi harus melihat keduanya bergerak secara mutual, bukan salah satunya mendahului yang lain.
3. Globalisasi menawarkan kerangka di mana perubahan politik dapat dimengerti. Teori mengenai globalisasi tidak dapat statis mengakui adanya identitas *states* dan sistem yang stabil.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perdebatan Teori dalam Hubungan Internasional

Perdebatan teoritis dalam sebuah ilmu bukanlah sesuatu yang baru, pada khususnya di dalam ilmu-ilmu sosial. Begitu juga dalam ilmu hubungan internasional. Walaupun umurnya belum begitu panjang dibandingkan ilmu sosial lainnya, posisi unik hubungan internasional mengharuskan ilmu tersebut membuka diri pada pengaruh berbagai disiplin dan sebaliknya turut

mempengaruhi berbagai disiplin. Steve Smith (Smith, 1995) melakukan otobiografi ilmu ini dengan sangat baik, oleh karena itu genealogi hasil karyanya akan digunakan untuk memosisikan masalah *great divide* di atas dalam ilmu hubungan internasional. Smith membagi perdebatan dalam teori hubungan internasional menjadi sepuluh bentuk. Dengan menggambarkan persengketaan-persengketaan yang terjadi Smith memberikan observasi atas bagaimana para ilmuwan hubungan internasional memandang hubungan internasional sebagai sebuah disiplin. Mengenai apa seharusnya fokusnya, batasannya, dan lain sebagainya.

Perdebatan pertama ialah antara keinginan melihat hubungan internasional melalui *international theory* dan *political theory*. Tokoh sentral dalam dikotomi ini ialah Martin Wight, secara lebih umum ada pada *english school of international relation*. Wight mengatakan fokus teori politik pada *state* menyulitkan, bahkan mengacaukan tujuan dari ilmu hubungan internasional dalam pembangunan komunitas di luar *state*. Ini berkaitan dengan keinginan pembentukan *world society* sebagai hasil dari hubungan internasional. Perdebatan kedua ialah antara pemikiran *communitarian* dan *cosmopolitan*. Perbedaannya adalah *communitarian* melihat komunitas politik sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam masyarakat internasional, sementara kelompok *cosmopolitan* menginginkan nilai berdasarkan kemanusiaan secara keseluruhan atau dalam tiap-tiap individu. Perdebatan ketiga ialah antara realis, rasionalis, dan revolusionis. Secara berurutan melihat politik internasional sebagai anarki, campuran antara konflik dan kerjasama, dan sebagai kemanusiaan (*civitas maxima*).

Kemudian adalah tiga gelombang perdebatan besar dalam ilmu hubungan internasional. Perdebatan besar pertama adalah antara *idealism* dan *realism*, lalu antara *traditionalist* dan *behavioralist*, terakhir antara *state centric realism* dan *behaviouralism*.

Kelima adalah antara tiga paradigma besar dalam hubungan internasional. Paradigma tersebut adalah realis, pluralis/liberal, dan globalis/strukturalis. Berbeda dengan *the great debate* sebelumnya, ketiga paradigma yang bersaing ini *coexist* dalam kajian hubungan internasional mulai tahun 80-an. Ketiganya

memiliki perbedaan yang sangat tipis, bahkan beberapa teori dan konsep saling tumpang tindih antara satu sama lain. Namun yang kemudian dikedepankan ialah membedakannya melalui aktor, isu utama, dan proses yang dibahas oleh masing-masing paradigma. Perdebatan keenam masih berkaitan dengan *great debate* sebelumnya ialah mengenai peran *state* dalam hubungan internasional. Perbedaannya ada pada *state centrism* yang melihat negara berperan sebagai aktor utama dan *transnationalism* yang melihat *state* hanya salah satu aktor dari berbagai aktor lain.

Ketujuh adalah antara *neorealism* dan *neoliberalism*. Keduanya sebenarnya serupa dalam berbagai hal seperti konsep anarki dan rasionalitas. Menurut Smith kedua pandangan ini dapat digolongkan sebagai dua alternatif dari satu pandangan khusus mengenai hubungan internasional, dan bukan dua pandangan yang berbeda satu sama lainnya. Debat kedelapan adalah perdebatan *postpositive* yang didorong oleh gerakan yang sama di dalam filsafat dan ilmu sosial lainnya. Perbedaannya ada pada epistemologi ilmu pengetahuan secara keseluruhan, bagi *postpositive* tidak pernah ada kebenaran sesungguhnya hingga menolak segala bentuk usaha pembuatan teori empiris mengenai apapun. Hasilnya adalah perdebatan yang tidak berujung karena perbedaan yang terlalu besar hingga sulit menghasilkan apapun.

Dua perdebatan terakhir dilakukan oleh Smith atas dasar perbedaan pandangan antara *explanatory* dan *constitutive theory* serta *foundational* dan *anti-foundational theory* (Smith, 1995). *Explanatory theory* ialah teori yang melihat dunia sebagai sebuah hal yang ada di luar teori tersebut karenanya obyektivitas teori merupakan sesuatu yang mungkin. Sebaliknya *Constitutive theory* adalah teori yang memandang bahwa teori yang dibangun turut membangun dunia yang 'diteorikan'. *Foundational theory* dan *anti-foundational* sejalan dengan perdebatan epistemologis yang telah dijelaskan diatas. Perdebatan diantaranya adalah apakah kita dapat melakukan tes atau verifikasi terhadap sebuah prosedur yang netral dan obyektif. *Foundationalist* berpendapat bahwa seluruh *true science* dapat diuji apakah benar atau salah. Sementara *anti foundationalist* sebaliknya

berpikir bahwa kebenaran tidak dapat ditentukan karena tidak pernah ada dasar yang netral untuk mengujinya.

Dari kesepuluh perdebatan teoritis di atas, masalah *the great divide* dapat menyinggung beberapa diantaranya. Persinggungan pertama ada pada antara *cosmopolitansim* dan *communitarianism*. Pemisahan antara dunia yang *community based moral orders* dan *universality* selalu menempatkan *state* sebagai salah satu di antaranya. Namun kenyataannya peran *state* hampir selalu berada di antara keduanya. Ini juga berkaitan dengan perdebatan mengenai peran negara dalam hubungan internasional antara *state centrism* dan *transnationalism*. Globalisasi membuat pertanyaan mengenai terciptanya, bertahannya, dan menyebarnya nilai menjadi semakin penting dalam membuat meragukannya kategorisasi sederhana antara nilai partikular dan nilai universal. Apakah ada yang namanya nilai lokal yang selalu menjadi lokal? Apakah ada nilai universal yang tepat untuk seluruh dunia? Sedangkan hal yang sama juga membuat *state centrism* tidak dapat lagi dipertahankan. Fenomena hubungan internasional sudah terlalu rumit untuk hanya menempatkan *state* sebagai aktor tunggal.

1.5.2. Kompleksitas dalam Hubungan Internasional

konsep mengenai penggunaan kompleksitas untuk hubungan internasional yang dituliskan oleh Harrison dalam *Complexity in World Politics*. Menurut Harrison sebuah teori dapat diklasifikasi menggunakan cara pandang kompleksitas jika mencakup hal-hal berikut:

1. Emergence

Sistem yang kompleks adalah lebih dari sekedar penjumlahan dari bagian-bagiannya (*sum of its parts*). Artinya, komponen dari sistem merupakan sesuatu yang emergent, tercipta oleh interaksi unit-unitnya. Di dalam dunia sosial unit dasar dari seluruh kelompok sosial yang ada adalah individu. Institusi sosial dan politik oleh karena itu, muncul dari interaksi antar manusia atau kelompok-kelompok manusia. Kelompok-kelompok sosial tersebut dapat berupa lokal atau nasional, dapat terorganisasi secara terpusat ataupun tidak, dan lain sebagainya. Dari interaksi-interaksi tersebut munculah

seperangkat institusi, manusia, dan praktik-praktik yang kemudian dikenal dengan nama *state*.

2. *Open System*

Sistem yang terbuka sangat rentan terhadap pengaruh eksternal dan internal, perubahan kualitatif, dan *emergence*. Hasilnya dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang berbeda, dan sebab yang sama dapat berujung pada hasil yang berbeda. Perubahan yang kecil dapat menyebabkan pergeseran sistem yang radikal. Perubahan tersebut dapat berasal dari perubahan di lingkungannya, dari dalam, ataupun hasil dari interaksi antar agen pembentuk sistem. Karena itu *open dynamic system* tidak dapat diprediksi, namun bukan berarti kemudian harus dimodelkan ke dalam sistem yang tertutup.

3. *Meta-agents*

State adalah *emergent system* sekaligus unit dari sistem internasional. Artinya perilaku state adalah hasil dari interaksi model internal dan kenyataan eksternal, yang *feedback* nya ada di tingkat internal ataupun pas-tidaknya perilaku tersebut di dalam lingkungannya.

4. *Internal Models*

Setiap agen memiliki model internal tentang keinginan dan keyakinan bagaimana mencapai keinginan tersebut di dunia. Ketika keyakinan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, mereka akan berperilaku menyimpang, gagal mencapai tujuan, bahkan harus menerima konsekuensinya. Agen kemudian belajar dari pengalaman tersebut, mengubah model internalnya, yang kemudian mengubah perilakunya. Perilaku agen responsif dan bertujuan namun bukan berarti rasional secara obyektif. Agen rasional ketika perilakunya sejalan dengan keinginan dan keyakinannya, namun tidak ada asumsi bahwa hasil dari pilihan agen dapat rasional secara kolektif ataupun akan sejalan dengan tujuan agen. Karena agen tidak dapat memprediksi efek dari tindakannya di dalam sistem yang kompleks, perilaku agen merupakan sesuatu yang secara optimal teradaptasi menurut situasi hanya sebagai suatu kebetulan. Rasionalitas merupakan subyektif.

Model internal mengendalikan perilaku agen, namun model tersebut mungkin berubah ketika diuji di lingkungan yang berbeda. Agen yang secara konsisten berperilaku secara suboptimal menurut lingkungannya menghadapi kepunahan.

5. *Dynamic System*

Perbedaan antara teori sistem pada umumnya dengan sistem kompleks adalah sistem kompleks melihat struktur adalah suatu yang dinamis sementara organisasinya tetap. Untuk mendeskripsikan organisasi, yang dibutuhkan hanyalah menggambarkan hubungannya bukan komponennya. Struktur karenanya hanya merupakan sebuah perwujudan yang mengambang dari organisasi mendalam di dalam keadaan chaos yang jelas.

Setiap keadaan seimbang adalah kejadian yang mengambang di dalam kondisi yang spesifik, sebuah titik dalam lajur perubahan.

6. *Causality*

Ada empat sebab mengapa kausalitas tidak dapat diterapkan dalam sistem kompleks. Pertama kausalitas hanya mungkin di dalam sistem yang tertutup yang kondisinya dapat dikontrol. Kedua sistem kompleks sangat kompleks hingga isolasi pada satu sebab membahayakan karena dapat terlalu menyederhanakan model. Tiga *immediate cause* bisa merupakan bagian dari serangkaian sebab, yang mungkin saja sebab sebelumnya lebih penting. Empat kausalisasi dapat simultan, karena di dalam sistem kompleks interaksi dari bagian-bagiannya membentuk sistem. Karena itu teori harus memfokuskan pada evolusi dalam sistem, bukan pada event satuan dalam usaha analisisnya.

1.5.3. Sistem dalam Ilmu Hubungan Internasional

Kata sistem berarti sebagai bagian dari keseluruhan di dalam batasan yang ditetapkan, di mana di luarnya terdapat lingkungan. Penetapan batas biasanya dilakukan untuk membantu analisis manusia, seperti yang dilakukan oleh biologis, misalnya, untuk menganalisis ekosistem di daerah tertentu. Sistem biasanya terdiri

dari elemen-elemen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam pola-pola tertentu.

Di dalam ilmu hubungan internasional kata sistem telah banyak digunakan dalam berbagai paradigma penelitian. Robert Cox mengatakan bahwa teori sistem menggabungkan dua pendekatan yang berbeda dalam ilmu hubungan internasional, yaitu pendekatan aksi-interaksi dan pendekatan struktural (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996 hlm. 100). Sistem menghubungkannya melalui agregasi aksi dan interaksi *state* menjadi sebuah pola yang membentuk struktur yang mempunyai karakter tersendiri.

Pendekatan melalui sistem di dalam HI contohnya adalah konsep mengenai polaritas, *cascading interdependence*-nya James Rosenau, atau tulisan-tulisan Karl Deusch dan J. David Singer mengenai struktur politik. Berbagai pendapat juga dapat ditemukan mengenai hakekat sistem dalam level internasional. Morton A. Kalplan mengatakan bahwa ada sebuah *system of action* yang merupakan kumpulan variabel yang sangat erat berhubungan, yang menunjukkan regularitas hubungan internal dan menunjukkan pola hubungan eksternal. George Modelski mendefinisikan sistem internasional sebagai sistem sosial yang memiliki kebutuhan fungsional dan struktural (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996). Sistem internasional memiliki rangkaian obyek-obyek dan memiliki pola tindakan. Richard N. Rosecrance mengatakan bahwa sistem memiliki input yang berpengaruh, regulator yang berubah akibat input, dan hambatan lingkungan yang meringankan gangguan dari luar menghasilkan hasil yang stabil atau tidak stabil. Yang paling terkenal tentunya adalah Wallerstein dalam konsepsinya mengenai *World System* dengan menggunakan pendekatan marxis untuk mengelompokkan negara-negara di dalam sistem internasional berdasarkan kelas. Bahkan pendekatan-pendekatan seperti *structural realism*-nya Kenneth Waltz atau *game theory* di dalam tradisi liberal dapat ditempatkan sebagai bagian dari teori sistem (Viotti & Kauppi, 2000 hlm. 252-253).

Kritik mengenai teori sistem dalam ilmu hubungan internasional berfokus pada tuduhan karena reduksionis dan tautologis. Hoffman mengatakan bahwa pendekatan sistem membangun kebenarannya sendiri dengan memprediksi masa

depan berdasarkan generalitas (*path dependent*). Sedangkan Modelski mengkritik sistem sebagai teori yang terlalu besar untuk menangkap spesifikasi di dalam politik (Dougherty & Pfaltzgraff, hlm. 134).

Namun kesalahan dari teori-teori sistem terdahulu yang paling fatal ialah simplifikasinya dalam mengobservasi dunia. Karena itu Neil Harrison menyarankan ilmu hubungan internasional untuk membuka diri terhadap *complex system* daripada *simple system* yang banyak dipergunakan sebelumnya (Harrison, 2006 hlm. 11-12). Hakekat dari *complex system* yang lebih faktual tidak dapat ditangkap oleh penggunaan sistem sederhana yang banyak diterapkan dalam teori hubungan internasional. Unsur utama dari sistem yang kompleks adalah ketidakpastian, yang tentunya akan sulit dijelaskan dalam prinsip kasualitas yang dipakai di teori-teori sistem sebelumnya.

1.5.4. Globalisasi, Sistem Finansial Internasional dan Hubungan Internasional

Pembahasan mengenai globalisasi di dalam ilmu hubungan internasional tidak sulit untuk ditemukan. Kebanyakan tulisan ialah mengenai bagaimana *state* menghadapi tekanan dari globalisasi dan apa dampak terhadapnya. Pendapat mengenai mengikisnya peran *state* mendominasi tulisan-tulisan tersebut, kebanyakan berfokus pada kekuatan perekonomian. Susan Strange mengatakan bahwa jika dulu *state* adalah penguasa pasar kini pasar adalah penguasa atas cara *states* menjalankan pemerintahan (Strange, 1996). Sementara Robert Cox (Clark, 1999 hlm. 96) mengatakan bahwa *state* kehilangan kekuatannya untuk melindungi ekonomi domestik dari efek negatif globalisasi. Keduanya menggambarkan bagaimana *state* kehilangan otonomi dalam memilih kebijakan ekonominya dihadapan globalisasi.

Globalisasi membatasi otonomi ekonomi *state* melalui tiga aspek; dorongan untuk kompetitif di tingkat internasional (Cerny, 1996), hambatan karena keharusan mempertahankan *financial soundness* (Cerny, 2000), dan konsekuensi mobilitas kapital (Keohane & Milner, 1996). Ketiga hal diatas meminimalisasi pilihan kebijakan *state* untuk memajukan ekonomi nasionalnya. Akibatnya adalah

keseragaman pada kebijakan-kebijakan ekonomi *state*, dalam hal ini Strange mengatakan 'Adalah hal yang biasa ketika *state* harus terus berubah, yang baru dan tidak biasa adalah ketika hampir semua *state* harus melewati perubahan mendasar yang sama dan dalam periode waktu yang singkat (Strange, 1996 hlm. 86-87). Keseragaman ini menyebabkan *state* tidak lagi ada di dalam posisi untuk mengejar kesejahteraan sosial sebagai masalah utama ekonomi (Cerny, 2000). Kini, fokus perhatian pemerintah modern ada pada usaha untuk sebisa mungkin lepas dari risiko kegagalan makro ekonomi hingga kehilangan konsentrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Capling & Crozier, 1998).

Gilpin menyebutkan bahwa sistem finansial internasional telah mengintegrasikan perekonomian secara global melalui pergerakan modal dari dan ke seluruh dunia. Besarnya kuantitas modal yang bergerak, kecepatannya yang tinggi, dan cakupannya global dari pergerakan modal sangat penting di periode pasca perang. Pendapat lain mengenai pembentukan sistem finansial internasional dapat ditemukan dalam tulisan Rawi Abdelal (Abdelal, 2002). Menggunakan kerangka konstruktivis Wendt, Abdelal mengajukan teori mengenai bagaimana *state* dan organisasi internasional mengkonstruksi keharusan liberal kapital yang pada bersamaan membuat kontrol kapital sebagai sesuatu yang haram. Ia menggambarkan bagaimana tiap usaha untuk membuat peraturan-peraturan internasional mengenai sistem finansial secara tidak langsung ataupun langsung memaksa negara-negara di dunia untuk melakukan liberalisasi finansial. Negara-negara yang belum meliberalisasi sistem finansialnya terpaksa melakukan liberalisasi untuk menuruti peraturan-peraturan yang dibuat melalui IMF, WTO, ataupun OECD.

Selain itu Abdelal mengkritik pemikiran yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai aktor utama pembentukan sistem finansial internasional. Abdelal berpendapat walaupun secara bilateral AS banyak melakukan perjanjian yang isinya mengharuskan mitranya meliberalisasi sistem keuangannya, Eropalah yang berperan besar dalam menuliskan peraturan-peraturan serupa di dalam organisasi-organisasi multilateral.

Kebanyakan tulisan mengenai sistem finansial internasional diarahkan pada ketidakstabilan sistem tersebut dan usaha untuk mencari cara untuk membuatnya stabil. Menurut Gilpin ada beberapa wacana mengenai cara yang harus ditempuh untuk melakukan regulasi pada sistem finansial internasional (Gilpin, 2004). Wacana yang pertama ialah kepercayaan bahwa satu-satunya cara mengatasi masalah dari sistem finansial internasional ialah dengan membiarkan pasar menyelesaikannya. Kepercayaan ini timbul dari anggapan bahwa yang menjadikan investor terus berspekulasi ialah kepercayaan bahwa pemerintah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dengan tidak adanya peraturan apapun investor harus menanggung risiko sendiri hingga akan lebih hati-hati dalam berspekulasi. Wacana kedua ialah dengan memperkuat peran IMF sebagai supervisor keuangan internasional. Peran yang ingin ditingkatkan antara lain dengan; meningkatkan transparansi dan pengumpulan informasi, kode perilaku dan pengawasan yang lebih baik, terakhir IMF sebagai *lender of last resort*. Dan yang terakhir ialah pendapat bahwa dibutuhkan tata peraturan yang benar-benar *rigid* bahkan menyarankan dikembalikannya kontrol kapital untuk mencegah *capital flight*.

Tokoh lainnya dalam ilmu ekonomi politik internasional adalah Susan Strange. Mungkin Susan Strange dapat dikatakan sebagai tokoh utama dalam kajian ekonomi politik mengenai sistem finansial internasional. Bukunya yang berjudul *Casino Capitalism* yang ditulis pada akhir 80-an dan revisinya yang berjudul *Mad Money* menjadi bacaan wajib bagi mereka yang tertarik dengan aspek politik dari ekonomi global (Strange, 1986, 1996). Ia lah yang pertama kali dengan jelas mendeskripsikan ancaman terus menerus dari sistem keuangan kontemporer pada perekonomian dunia dan kestabilan politik yang secara sederhana didefinisikan sebagai *mad* dalam makna leksikalnya. Krisis ekonomi Asia yang terjadi setahun sebelum kematiannya membuktikan asumsi tersebut.

Strange mengatakan keseluruhan tulisannya dapat dirangkum kepada usaha untuk menarik perhatian pada tiga hal berikut (Strange, 1998). Pertama, ialah kebutuhan untuk mengangkat studi mengenai aspek politik dari sistem finansial internasional dalam ilmu hubungan internasional. Kedua ialah kebutuhan untuk melampaui

teori politik dan ekonomi liberal dan mengenali pentingnya kekuatan struktural di dalam sistem internasional. Dan terakhir, adanya kebutuhan untuk menyadari bahwa keacuhan terhadap peran sistem finansial internasional di dalam era revolusi teknologi yang masif dan globalisasi malah meningkat, bukan berkurang. Tulisan lain yang patut dibahas secara mendalam adalah karya Yilmaz Akyuz dan Andrew Cornford yang berjudul *Capital Flows to Developing Countries and the Reformation of the International Financial System* (Akyuz & Cornford, 2002). Mereka menunjukkan bagaimana negara berkembang sebenarnya lebih terancam oleh tidak stabilnya sistem finansial internasional meskipun keuntungan yang didapatkan jauh lebih kecil dari sistem tersebut. Sistem finansial internasional memudahkan aliran modal ke negara berkembang hingga mendorong liberalisasi finansial di tingkat domestik. Pada dasarnya kemudahan ini membawa dampak positif karena meningkatkan aliran investasi dan meningkatnya akses terhadap kapital bagi industri di negara berkembang ke perekonomian negara maju. Namun menurut Akyuz dan Cornford ada dua hal yang menunjukkan sebaliknya.

Pertama, seperti yang telah disebutkan di atas meleburnya sistem ekonomi negara berkembang ke sistem finansial internasional akan mendorong liberalisasi finansial secara domestik. Liberalisasi ini menimbulkan sumber- sumber krisis baru di negara-negara berkembang. Negara yang tadinya tidak terpengaruh oleh krisis finansial harus menghadapi ketidakstabilan pasar internasional. Hasilnya ialah semakin meluasnya dampak dari krisis. Hal yang kedua adalah yang membuat negara berkembang lebih dirugikan dibandingkan dengan negara maju. Mengalir derasnya investasi asing ke negara berkembang menyebabkan sebagian besar industri, yang mendukung sebagian besar GNP-nya, di negara berkembang dikuasai oleh permodalan asing. Hasilnya adalah ketergantungan luar biasa pada modal dari luar negeri, baik berupa pinjaman atau investasi. Kombinasi ini menyebabkan ketika terjadi krisis negara berkembang dihadapkan pada kesulitan yang lebih besar dibandingkan negara maju.

Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lain yang memiliki perhatian khusus pada sistem finansial internasional di dalam ilmu hubungan internasional. Diantaranya adalah Jan Scholte yang aktif mendorong terciptanya *governance* pada sistem

finansial atau Robert Cox dalam tulisannya mengenai hegemoni struktural. Untuk menyimpulkan, tulisan-tulisan tentang sistem finansial internasional di dalam konteks ilmu hubungan internasional atau ekonomi politik internasional, disamping keberagamannya, membagi sebuah tema yang sama, yaitu anarki finansial yang berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan politik.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang artinya penggunaan lebih dari satu metode dalam penelitian, pengambilan data, dan metodologinya. Metode kualitatif digunakan dengan melakukan interpretasi ulang sejarah pembentukan sistem finansial global dengan penerapan teori sistem modern. Metode kuantitatif digunakan dengan proses pengujian teori sistem modern berdasarkan kriteria yang diberikan Ian Clark mengenai ciri teori yang mampu menjelaskan globalisasi dengan komperhensif. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif dan interpretatif dari hasil kajian pustaka dan temuan data.

Berdasarkan sumber datanya penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan melalui penelitian koleksi literatur, artikel jurnal dan majalah di Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional FISIP UI, Perpustakaan FISIP UI, Perpustakaan *Freedom Institute*, Perpustakaan CSIS, dan Perpustakaan STF Driyarkara, dan situs-situs internet.

1.7. Sistematika Penelitian

1. **Bab I** adalah Pendahuluan. Bagian ini terdiri atas latar belakang yang memberikan gambaran umum mengenai situasi, kondisi, dan karakteristik penelitian yang menjadikannya penting untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan permasalahan untuk memperjelas pertanyaan permasalahan yang diangkat untuk dijawab dalam pembahasan. Selanjutnya adalah kerangka teori yang isinya adalah alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tinjauan pustaka untuk memaparkan literatur yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat.
2. **Bab II** berisi pembahasan mengenai genealogi teori sistem modern.

3. **Bab III** berisi mengenai teori hubungan internasional di dalam fenomena globalisasi dan bagaimana teori sistem modern dan teori hubungan internasional dapat saling melengkapi dalam analisis fenomena globalisasi
4. **Bab IV** adalah penggambaran evolusi sistem finansial internasional berdasarkan kerangka teori sistem modern sebagai contoh empiris.
5. **Bab V** berisi kesimpulan dari skripsi ini

